PROBLEMATIKA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI

Ciline Ria Aprillia

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Jurusan PMP-KN, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Surabaya,
celinera0906@gmail.com

Abstrak

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan serta membersihkan nama terpidana jika terdapat bukti baru (*novum*) yang ditemukan ketika sidang berlangsung atau sesudah putusan dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Upaya peninjauan kembali diajukan oleh terpidana Antasari Azhar kasus pembunuhan korban Nasrudin Zulkarnaen tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga Antasari tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi berdasar pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja". Oleh karena itu Antasari mengajukan uji materiil (*judicial review*) Pasal 268 ayat (3) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Antasari dan keluarganya, sehingga secara eksplisit Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali berdasar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat dibenarkan hukum serta kedudukan hukum Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku, literatur yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal ilmiah dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mempunyai kedudukan hukum setara dengan undang-undang sampai ada peraturan baru atau revisi KUHAP terkait Peninjauan Kembali hanya satu kali. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* (mengikat kepada publik, semua orang tidak hanya pihak yang berperkara), *final and binding* sesuai asas *res judicata veritate habetur* (apabila terjadi konflik antara putusan pengadilan dan undang-undang maka yang berlaku adalah putusan pengadilan) dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 berlaku terhadap Peninjauan Kembali perkara pidana, sehingga Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali jika terdapat *novum* (bukti baru).

Kata kunci : Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Reconsideration is an extraordinary legal remedy of last resort filed by the convict and / or their heirs to justice and clear the name of the convict if there is new evidence (*novum*) were found when the trial takes place or after the verdict and has permanent legal force (*in kracht van gewijsde*). Efforts reconsideration filed by the convict Antasari Azhar murder of Nasrudin Zulkarnaen victim but was rejected by the Supreme Court that Antasari can not file another legal action under Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code which states that "judicial review can only be done one time only". Therefore Antasari filed a judicial (judicial) of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code to the Constitutional Court by the Decision No. 34 / PUU-XI / 2013. The Constitutional Court's decision to grant the request Antasari and his family, so explicitly Reconsideration can be filed more than once, but

in fact to date Reconsideration only be submitted one time under Article 24 paragraph (2) of Law No. 48 of 2009, Article 66 paragraph (1) of Law No. 3 of 2009, as well as SEMA No. 7 of 2014 on Reconsideration Request Submission in criminal cases. This study aimed to assess the consideration of judges in Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 can be justified in the law and the legal position of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 against Article 24 paragraph (2) of Law No. 48 of 2009. This research is a normative law. The approach used in this research is the approach of legislation, the conceptual approach, and approach cases. Legal material collection techniques in this study was obtained from the legislation, books, literature written by legal experts, scientific journals and also obtained from the Internet, and other media related to the object of legal research. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 have no legal status equivalent to existing laws until new legislation or revision of the Criminal Procedure Code related Reconsideration only one time. Constitutional Court decision is *Erga Omnes* (binding to the public), final and binding principle of *res judicata veritate habetur* (in case of conflict between the court judgment and undag-law shall prevail court decision) in this case the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU XI / 2013 shall apply to a judicial review of criminal, so that judicial review may be filed more than once if there *novum* (new evidence).

Keywords : Reconsideration, the Constitutional Court's Decision, the Judicial Power

PENDAHULUAN

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim harus memahami tugas dan kewajibannya.¹ Tugas hakim menegakkan hukum berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada hakim.² Sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian, manfaat dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. MA merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari MK yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi.

Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa PK. PK pernah diajukan oleh terpidana Antasari Azhar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang didakwa turut serta menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan

rencana terlebih dahulu atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2010 Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, Antasari Azhar merasa tidak pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnaen dan mengajukan Banding, Kasasi hingga PK pada MA tanggal 13 Februari 2011 dengan putusan Nomor 117 PK/PID/2011 namun ditolak.

Antasari Azhar merasa hak konstitusionalnya dibatasi karena tidak bisa mengajukan upaya hukum lain sebagaimana Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja". Oleh karena itu Antasari dan keluarga mengajukan uji materiil ke MK dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK berpendapat bahwa secara umum KUHAP bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) dari kesewenang-wenangan terutama terkait hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental manusia, Pengadilan yang seharusnya melindungi HAM tidak membatasi PK hanya sekali. Dengan membatasi PK, pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran. Sebab mungkin saja ada keadaan baru atau *novum* yang ditemukan setelah PK diajukan sebelumnya, *novum* dapat ditemukan kapan saja tanpa batas waktu.

¹Bambang, Sutiyoso dan Sri Hastuti, Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm.125

²Sudikno, Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm.136

Aturan umum tentang PK hanya berlaku satu kali selain terdapat pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP juga terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali". Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut UU MA) menyatakan bahwa "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Undang-undang kekuasaan kehakiman dan UU MA tidak hanya berlaku bagi perkara pidana tetapi juga perkara perdata dan tata usaha negara, sedangkan untuk perkara pidana telah dikhususkan pada pasal 263 sampai 269 KUHAP sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum tanggal 6 Maret 2014, setelah penetapan putusan MK terdapat banyak perbedaan pendapat tentang pengajuan PK yang dapat diajukan lebih dari satu kali, salah satunya MA. Ketua MA Hatta Ali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Selanjutnya disebut SEMA PK Pidana), yang berlaku bagi seluruh hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa dan memutus permohonan PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, PK merupakan upaya hukum luar biasa yang tercantum di dalam Bab XVIII KUHAP. Alasan PK jika terdapat keadaan baru (*novum*) dapat diketahui atau ditemukan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, serta menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

MA diberi wewenang membuat Peraturan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut PERMA) sebagai pelengkap (*complementary*) untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Dalam kenyataan praktik, selain PERMA dikenal juga SEMA.³ Pada tanggal 31 Desember 2015 MA mengeluarkan

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa PK hanya boleh satu kali.

Pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan, kewenangan yang dimiliki hanya dibatasi pada segi-segi pelaksanaan dan tidak ada kewenangan untuk mengatur (*wetgever*).⁴ SEMA ini merupakan peraturan kebijakan yang hanya mengikat pihak internal dalam hal ini hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak seharusnya MA mengeluarkan SEMA karena telah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan PK lebih dari satu kali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut perihal Putusan MK tentang Pembatasan Peninjauan Kembali yang akan penulis tuangkan dalam penelitian karya tulis ilmiah dengan judul skripsi "**PROBLEMATIKA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI.**"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Normatif.⁵

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah "pendekatan dengan mengkaji sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis".⁶ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah "pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai

⁴Bagir, Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm.168

⁵Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.34

⁶*Ibid.*, hlm.185

³Yahya, Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.174

kekuatan hukum tetap”.⁷ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah “pendekatan yang berawal dari peraturan perundang-undangan, pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti”.⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) tentang peninjauan kembali yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, berita website dan kasus-kasus hukum yang berkaitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

Penelitian hukum ini menggunakan langkah-langkah antara lain mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum tersebut dapat didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini. Pengumpulan bahan hukum ini juga didapatkan dari tinjauan kepustakaan, internet, maupun media lainnya. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

Teknik analisis bahan hukum diawali dengan menentukan fokus utama Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang diajukan uji materiil. Putusan MK dan Peraturan perundang-undangan kemudian dikaji dan ditelaah dengan menggunakan metode preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Antasari Azhar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK) dan pensiunan Jaksa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar pada tahun 2009. Atas perbuatan tersebut Antasari di vonis 18 tahun penjara, upaya hukum terakhir PK juga ditolak oleh MA.

Rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan PK untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum, hak para pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh undang-undang yang diajukan untuk diuji materiil yang menutup kemungkinan bagi para pemohon merasa didzolimi atas undang-undang tersebut.

2. Para Pemohon

Para pemohon yaitu Antasari Azhar selaku terpidana, Ida Laksmiwaty sert Ajeng Oktarifka selaku istri dan anak dari Antasari Azhar, serta Advokat pada Kartika Law Firm yang diberikan kuasa untuk itu.

3. Para Termohon

Pemerintah Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Pemerintah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI)

4. Alasan permohonan pengujian Undang-Undang Hukum Acara

Pemohon I merupakan terpidana, dimana putusan MA memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010. Berdasarkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP pemohon I tidak mempunyai upaya hukum lain untuk membersihkan namanya jika suatu saat terdapat bukti baru (*novum*). Asas kepastian hukum sudah terpenuhi berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, karena pengajuan PK tidak

⁷*Ibid.*, hlm.190

⁸*Ibid.*, hlm.185

menghalangi eksekusi sehingga suatu perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dengan sendirinya dengan proses yang sudah final.

5. Permohonan Para Pemohon

Menerima permohonan para pemohon seluruhnya, menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan diketemukannya keadaan baru (*novum*). Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).

6. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para pemohon:
 - 1.1 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 1.2 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat dibenarkan oleh Hukum

a. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan MK terdapat pada Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK. Salah satu kewenangan MK adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian undang-

undang *in casu* Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka MK berwenang mengadili permohonan *a quo*.

b. Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon

1. Pemohon Antasari Azhar S.H.,M.H.
Perseorangan warga negara Indonesia selaku terpidana, Karena berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Antasari tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi untuk membersihkan namanya. Atas dalil pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) menurut MK pemohon telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*)
2. Pemohon Ida Laksmiwyaty S.H., dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri
Perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan istri dan anak dari pemohon Antasari, oleh karenanya memiliki hubungan sebagai keluarga yang dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian apabila dikabulkan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

c. Pokok Permohonan

Para pemohon mendalilkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan: Dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

Kepastian hukum harus diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk

menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat mencari kemenangan secara formal. Proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden yang pada pokoknya sebagai berikut: Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP pernah diajukan pengujiannya kepada MK dan diputus dengan Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 namun pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan dalam perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU MA, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai PK. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam beberapa undang-undang tersebut diatas, khususnya terkait PK telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila tidak diatur pembatasan PK, maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali PK dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai.

Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis DPR yang pada pokoknya adalah : Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Penekanan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis undang-undang dalam mengatur pengajuan PK.

PK hanya boleh satu kali telah konsisten terdapat pada tiga peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU MA, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sehingga usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam undang-undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan anatara ketiga undang-undang *a quo*.

Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para pemohon, sedangkan Presiden dan DPR tidak mengajukan kesimpulan. Keterangan dari Presiden dan DPR mengenai Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, pengujian yang diajukan tidak hanya pada pasal 268 ayat (3) KUHAP, tetapi juga pada pasal 24 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 66 ayat (1) UU MA yang mana keberlakuannya tidak hanya pada perkara pidana, tetapi juga pada perkara perdata dan tata usaha negara. Batu uji yang diajukan antara Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 juga berbeda sehingga berdasar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK dapat dimohonkan pengujian kembali.

d. Tidak Ne bis in idem

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 batu ujinya berbeda dengan Putusan sebelumnya serta lebih menekankan pada batu uji Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Sehingga menurut mahkamah permohonan para pemohon tidak *ne bis in idem*.

e. Isu konstitusional PK berdasar Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Sesuai prinsip *due process of law*.

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Kepastian hukum acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat fundamental yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Perlu diatur PK agar setiap orang yang menjalani dapat memperoleh keadilan.

Alasan terkait terpidana yaitu adanya *novum* atau bukti baru yang menguntungkan terpidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Keadilan terkait konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana. *Novum* dapat ditemukan kapan saja, tidak pasti kapan waktunya.

f. Pertimbangan Mahkamah terhadap dalil para Pemohon Pasal 268 ayat (3) KUHAP

PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut mahkamah PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan kepastian hukum dengan menentukan limitasi waktu. Sedangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu karena mungkin saja setelah diajukan PK dan diputus, ada *novum* baru ditemukan.

Secara umum KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental bagi manusia sebagaimana UUD NRI Tahun 1945. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum.

Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan HAM yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Pengajuan PK tidak terkait pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula pemenuhan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun menurut mahkamah hal itu terkait kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan membolehkan PK hanya satu kali, manakala diketemukan *novum* justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan serta konsekuensi dari negara hukum.

2. Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan PK hanya boleh satu kali

Hakim MK dan hakim MA dapat merumuskan dan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi tidak didasarkan pada prinsip *rechtsstaat*⁹ (hakim merupakan corong undang-undang) yang hanya didasarkan pada aturan atau perundang-undangan saja tetapi juga berdasar pada pembuktian dan keyakinan hakim sesuai dengan teori *negatief wettelijke bewijs theorie* dan *in dubio proreo*.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi HAM, konstitusi bersepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara harus dilindungi salah satunya terkait dengan

⁹Ni'matul, Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.199

PK, PK merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Salah satu kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah MA, tetapi hanya terbatas satu kali. Sedangkan PK merupakan hak terpidana dan ahli warisnya untuk mencari keadilan yang mana tidak ada batas waktu ditemukannya bukti baru atau *novum*, jika dibatasi maka keadilan telah tereliminir.

Fungsi MK sebagai pelindung HAM merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi, wewenang MK menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat sebagai upaya melindungi HAM agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Jika ketentuan undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara. Ikhtisar MK melindungi HAM dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja", bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas dasar putusan MK dapat diketahui bahwa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar acuan membatalkan pasal yang diajukan *judicial review*. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 bersifat *final and binding*, berdasar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK menyatakan bahwa:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Putusan MK yang mengabulkan uji materiil pasal 268 ayat (3) KUHAP langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh karena MK merupakan pengadilan konstitusi pertama dan terakhir, dengan sendirinya Putusan MK telah mengubah ketentuan KUHAP tentang PK sehingga sejak dibacakan Putusan MK sudah mulai berlaku dan setiap penyelenggara negara serta warga negara

tidak dapat lagi menjadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan.

Kedudukan hukum serta kekuatan putusan MK dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan merupakan putusan konstitusional yang dapat dianggap sederajat dengan undang-undang akan tetapi hanya berlaku satu kali sebelum undang-undang mengatur lebih lanjut. Karena putusan MK dapat membatalkan produk perundang-undangan, pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK menyatakan bahwa:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.

Putusan MK yang menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini terkait Pasal 268 ayat (3) KUHAP setelah dibacakan oleh MK menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 58 UU MK menyatakan "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jadi KUHAP tetap berlaku, tetapi pasal 268 ayat (3) tentang PK hanya sekali sudah tidak berlaku lagi karena adanya Putusan MK, sehingga Putusan MK menggantikan kedudukan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Putusan MK terdapat perbedaan pendapat dengan aturan yang sudah ada sebelumnya yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali". Pasal 66

ayat (1) UU MA yang menyatakan bahwa "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali" serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan PK dalam perkara pidana pada angka 3 menyatakan bahwa "MA berpendapat permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali".

Peristiwa hukum yang terjadi dalam pengajuan PK pidana setelah adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah PK dapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi terdapat perbedaan atau konflik norma atau konflik aturan dengan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini Putusan MK berlaku menggantikan kedudukan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan untuk perkara perdata dan tata usaha negara tetap berlaku Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 66 ayat (1) UU MA.

Berdasarkan Pasal 76 UU MA yang menyatakan bahwa: "Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Dari pasal ini terlihat bahwa untuk PK perkara pidana telah dikhususkan dengan menggunakan acuan KUHAP. Sedangkan untuk PK perkara perdata terdapat pada Pasal 67 UU MA.

Penafsiran atau interpretasi yang dilakukan oleh hakim MK dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh terpidana Antasari Azhar adalah dengan menafsirkan kata dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang secara eksplisit PK dapat dilakukan lebih dari satu kali, sedangkan dasar PK hanya dapat dilakukan satu kali juga terdapat pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan peraturan perundang-undangan yang mana keberlakuannya mengikat secara umum (*lex generalis*) dalam pengaturan PK baik perdata ataupun tata usaha negara, sedangkan untuk PK pidana telah dikhususkan (*lex specialis*) dalam KUHAP yang mana terdapat pada Pasal 263 sampai 269 KUHAP.

Undang-undang kekuasaan kehakiman termasuk dalam sumber hukum formal undang-undang, sedangkan putusan MK merupakan sumber hukum formal yurisprudensi yang erat kaitannya dengan putusan hakim, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya baik eksekutif ataupun legislatif karenanya putusan hakim harus

dianggap benar sesuai asas *res judicata pro veritate habetur* ketika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan putusan hakim maka putusan hakim yang digunakan sebagai dasar acuan.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 berlaku sejak diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 6 Maret 2014, yang mana dimaksudkan bahwa PK pidana dapat diajukan lebih dari satu kali, meskipun MA mengeluarkan SEMA PK Pidana pada tanggal 31 Desember 2014 yang menyatakan PK hanya dapat diajukan satu kali tidak menghapus ketentuan yang telah diputuskan oleh putusan MK karena putusan MK bersifat *erga omnes* yakni mengikat secara umum tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga seluruh warga negara Indonesia karena pada hakikatnya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 mengatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana KUHAP itu sendiri berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.

SEMA tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hanya sebagai peraturan kebijakan yang berlaku bagi pihak internal dalam hal ini berlaku bagi hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tingkat Banding bukan mengatur dan mengikat warga negara Indonesia secara keseluruhan, dengan demikian SEMA telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena mengatur materi yang bukan kewenangannya. Dikeluarkannya SEMA dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK, MK menganggap bahwa SEMA PK pidana ini sebagai bentuk pembangkangan dari konstitusi, pembatasan pengajuan PK lebih dari satu kali melanggar prinsip keadilan dan perlindungan HAM.

Undang-undang kekuasaan kehakiman merupakan peraturan perundangan organik yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang organik bertujuan untuk menjabarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, penjabaran yang ada dalam teks undang-undang kekuasaan kehakiman tetap atau sulit berubah, sementara masyarakat terus berubah, undang-undang selalu tertinggal dengan peristiwa ataupun fakta maka ketika diajukan *judicial review* ke MK dengan kewenangan *constitutional review* menimbulkan sebuah kewenangan baru dengan menafsirkan konstitusi atau sering disebut *constitutional court* sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk

perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Hak untuk memberikan tafsir terhadap konstitusi maupun produk hukum agar memberikan penafsiran terhadap *text* konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui seluruh elemen negara, maka peradilan diberikan kewenangan memberikan tafsir. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum dan keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan, apalagi dalam hal ini MK merupakan tempat terakhir pencari keadilan pengajuan undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MK bersifat *erga omnes* khususnya dalam pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, KUHAP sendiri merupakan perundang-undangan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Pasal 268 ayat (3) KUHAP juga tidak berlaku lagi bagi seluruh warga negara Indonesia, yang secara eksplisit dapat mengajukan PK lebih dari satu kali.

Kedudukan hukum Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai pengganti Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena MK sebagai *negative legislator* (penghapus norma) sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah tidak dapat dijadikan acuan lagi dalam pengajuan PK Pidana. Sejak Putusan MK dibacakan maka PK dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali. Sedangkan untuk undang-undang kekuasaan kehakiman pada pasal 24 ayat (2) yang menyatakan "Terhadap peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali" berlaku bagi perkara perdata dan tata usaha negara.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Problematika Yuridis Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, maka peneliti dapat menyimpulkan Hal-hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan hakim MK dalam menjatuhkan putusan terkait PK yaitu terkait

hukum acara pidana yang merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Alasan PK yaitu ditemukannya bukti baru atau *novum* yang menguntungkan terpidana terkait keadilan konstitusional, yang mana bagi seseorang yang dijatuhi pidana, *novum* dapat ditemukan kapan saja, tidak pasti kapan waktunya. PK hanya dapat dilakukan satu kali secara umum terdapat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (*lex generalis*) sedangkan untuk perkara pidana terdapat pada KUHAP (*lex specialis*) sehingga untuk perkara pidana, PK dapat diajukan lebih dari satu kali dengan syarat adanya *novum* atau bukti baru. Serta SEMA yang dikeluarkan MA tentang PK pidana seharusnya tidak mengikat seluruh warga negara Indonesia. Karena pada hakikatnya SEMA hanya mengikat bagi pihak internal yang mana SEMA hanya merupakan peraturan kebijakan sedangkan putusan MK merupakan putusan yang bersifat *erga omnes* yaitu mengikat kepada publik tidak hanya bagi pihak yang berperkara tetapi secara umum. MK berhak menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana KUHAP sendiri keberlakuannya terhadap semua pihak, seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali sehingga jika ada putusan MK yang membatalkan salah satu pasal dalam KUHAP berarti juga berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang turut dalam KUHAP.

Kedudukan MK sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka dari segala pengaruh ekstra yudisial serta bertanggung jawab kepada rakyat melalui putusan MK sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Putusan MK terdapat perbedaan pendapat dengan aturan yang sudah ada sebelumnya yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan PK hanya boleh satu kali. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengandung tiga unsur penting yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan maka yang berlaku adalah putusan pengadilan sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yakni putusan hakim harus dianggap benar.

Saran

Peneliti memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :

1. Bagi pemerintah termasuk dalam hal ini adalah DPR diharapkan dapat menyikapi materi Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 dalam Revisi KUHAP yang tengah berjalan, khususnya melakukan revisi terkait Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar pengaturan PK perkara pidana berjalan linear dengan Putusan MK, serta lebih jelas berapa kali dapat diajukan PK, persyaratan tentang *novum* (bukti baru), pengaturan tentang ganti rugi apabila PK dikabulkan oleh MA, termasuk ganti rugi bagi terpidana yang telah menjalani hukuman mati harus diperinci untuk pengajuan PK selanjutnya. Sebelum adanya Revisi KUHAP pemerintah diharapkan untuk menindak lanjuti Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 yang masih memerlukan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana secepatnya tentang pengajuan permohonan PK terkait pengertian *novum*, pembatasan waktu dan tata cara pengajuan PK.
2. Bagi Mahkamah Agung diharapkan dapat menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak boleh merasa terbebani terkait kekhawatiran PK berkali-kali. MA tidak seharusnya melakukan pembangkangan pada Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang PK Pidana, para hakim agung harus secara jelas mempertimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan demi hak terpidana untuk memperoleh keadilan, serta diharapkan dapat memperbaiki SEMA PK Pidana.
3. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menggali dan melakukan penemuan hukum lebih baik lagi berdasar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia, serta dapat memberikan putusan yang berdasar konstitusional sesuai dengan perkembangan hukum yang berada ditengah masyarakat.
4. Bagi Negara diharapkan dapat mengevaluasi konflik norma atau konflik aturan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan Peninjauan Kembali dengan merujuk pada perlindungan Hak Asasi Manusia serta

keadilan terutama bagi terpidana dan/atau ahli warisnya.

5. Bagi masyarakat khususnya terpidana ataupun keluarga dan ahli waris terpidana diharapkan dapat memahami Putusan MK No.34/PUU-XI/2013, bahwa untuk peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali jika ada *novum* (bukti baru) berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agusty, Rizza Zia dan Suryanto, Siyo. 2014. *UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M (et.al). 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Pers
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni`matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir dan Kuntana, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press

- _____. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2005. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Naile, Victor Imanuel W. 2013. *Konsep Uji Materiil*. Malang: Setara Pers.
- Siahaan, Maruarar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soemantri M, Sri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Jurnal Ilmiah. Makalah. Tesis**
- Shidarta. 2011. *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*. Makalah dibawakan pada Seminar Penguatan Pemahaman HAM untuk Hakim seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali
- Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
- SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali